

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bantul)**

**Barbara Gunawan & Caraka Hadi
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of Human Resources Competence, Internal Control Systems, and the use of information technology on local government financial reports. This test uses the quality of local government financial statements as the dependent variable, as well as the Human Resources Competency variable, the Internal Control System, and the use of information technology as an independent variable. The sample used was government officials at the Office, Agency, Section and SKPD Office in Bantul Regency. This research uses purposive sampling method. The type of data used in this study is primary data. Based on the process of distributing questionnaires obtained a sample of 155 respondents. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression using the SPSS v.25 software application. The results showed that the competence of government resources, internal control systems, and the use of information technology had a positive effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: Human Resources Competence, Internal Control Systems, compensation, local government agency performance, use of information technology, local government financial reports.

PENDAHULUAN

Era industri 4.0 telah memberikan banyak pergeseran di berbagai sektor pemerintahan, khususnya di dalam sistem pengelolaan Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini tentunya memberikan dampak yang cukup baik bagi Pemerintah, misalnya pelayanan akan lebih efisien dan efektif. Penyusunan anggaran dan laporan keuangan akan terasa mudah karena adanya komputerisasi sehingga pelaporan kinerja Pemerintah akan lebih transparan dan akuntabel karena telah

dimuat dalam web Pemerintah dan dapat diakses oleh berbagai pihak khususnya masyarakat. Komputerisasi merupakan dampak dari implementasi desentralisasi fiskal di pemerintahan Indonesia, secara perlahan dan teratur tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang semula terpusat beralih ke tata kelola keuangan yang terdesentralisasi. Pengadaan desentralisasi merupakan solusi dari usaha yang kuat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan keadilan sosial rakyat Indonesia (Bintang dan Mujibussalim, 2019).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang cukup luas untuk mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, baik dengan bentuk kegiatan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, merumuskan strategi dan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kualitas dalam pembangunan daerah, desentralisasi sangat penting untuk memastikan kesiapan sumber-sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan program-program dan berbagai kegiatan peningkatan kualitas dan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat daerah. Penyelenggaraan kinerja yang baik menggambarkan adanya orientasi dari Pemda untuk menuju kepada good government. Artinya semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin baik Kualitas Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemda (Mudhofar & Tahar, 2016). Desentralisasi mengakibatkan banyak masalah dikarenakan setiap daerah mempunyai batasan pengetahuan dan kekuatan yang berbeda dilihat dari berbagai sisi seperti keuangan, ketersediaan infrastruktur yang dimiliki dan kualitas pengetahuan serta pengalaman manusianya (Fontanella, 2014).

Desentralisasi menjadi acuan penerapan otonomi daerah, otonomi daerah mencakup hak, wewenang Pemerintah, kewajiban yang di berikan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur atau mengelola urusan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Bintang, Mujibussalim, 2019). Pengelolaan keuangan sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengelola keuangan secara tertib, transparan, akuntabel serta dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan khususnya di Indonesia, dengan tujuan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah. Desentralisasi dapat mempersempit gerak pelaku pelanggaran administratif yang fatal dan beberapa menutup lingkup secara ekstensif oleh pelaku politik atau pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang (Unger & Mahakanjana, 2016).

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa opini diberikan kepada Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dari hasil kegiatan pemeriksaan yang dilakukan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018. Dari 87 Laporan keuangan yang telah disebutkan, 81 LKKL dan 1 LKBUN berhak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ada 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, masih ada 1 LKKL yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat

(TMP). Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017, pada Tahun 2017 sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP dan masih terdapat 6 LKKL memperoleh opini WDP dan 2 LKKL mendapat opini TMP (Dalam & Tangga, 2018). Lembaga yang belum mendapatkan opini WTP tersebut dikarenakan masih terdapat masalah kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud. Tetapi masalah tersebut secara keseluruhan tidak berdampak secara material pada kesesuaian LKPP Tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fakta lain yang diperoleh dari evaluasi oleh BPK mencerminkan bahwa lembaga yang belum mendapatkan opini WTP penyebabnya masih ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dari temuan tersebut BPK telah mengevaluasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Pelaporan Keuangan, yaitu:

1. Kegiatan pencatatan tidak sesuai dan akurasi belum dapat dikatakan baik.
2. Proses pembuatan laporan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penyampaian laporan belum tepat dengan waktu ditentukan.
4. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan serta pelaporannya kurang baik.
5. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan belum di suport dengan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional. Mengindikasikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal (BPK, 2018).

Manfaat utama dalam Laporan Keuangan yang dibuat contohnya seperti unit-unit atau bidang-bidang organisasi publik adalah untuk memberikan informasi yang berguna dan dapat digunakan bagi penyedia anggaran serta pengguna lainnya, baik yang mengalir maupun yang terpendam, untuk mengambil suatu tindakan yang baik berkaitan dengan alokasi dana ke organisasi tersebut (Surjono, 2018). Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi tidak patuhnya Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Negara yaitu:

1. Belum sepenuhnya menggunakan SiRUP dalam pembuatan rencana pengadaan.
2. Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan pembangunan gedung di berbagai dinas.
3. Kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan kawasan pemukiman (BPK, 2018).

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi dan tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini mencerminkan keterkaitan yang kuat yaitu kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Capaian kesuksesan organisasi dapat diperoleh dengan cara

memaksimalkan utilitas principals dan manajemen. Teori dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya (Imran, 2015).

Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Sektor Publik adalah suatu penggambaran posisi keuangan yang berasal dari kegiatan transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas bagian publik (Sholohah, 2018). Penggunaan informasi keuangan sektor publik dengan tujuan untuk membuat pemerintah yang memiliki tanggung jawab, untuk membantu dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan alokasi sumber daya yang efisien (Krambia et al., 2016). Sesuai dengan Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Kualitas Laporan Keuangan dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

Relevan

Suatu laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan yang relevan jika informasi dapat memberi pengaruh terhadap penggunaanya dengan membantu meninjau kembali atau mengevaluasi peristiwa masa kini ataupun peristiwa masa lalu, memprediksi kejadian masa depan, dan dapat memberikan koreksi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Informasi yang dikatakan relevan memiliki karakteristik, manfaat bagi penggunaanya sesuai dengan waktunya, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

Andal

Dapat dikatakan andal apabila informasi yang ada di suatu laporan keuangan terhindar dari suatu kesalahan secara material, dan memberikan informasi sesuai dengan keadaan aslinya dengan terhindar dari manipulasi, bisa diverifikasi, serta terhindar dari memihak hanya kepada pihak tertentu yang membutuhkan.

Dapat Dibandingkan

Dapat dikatakan dapat dibandingkan apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan di suatu periode yang telah berlalu.

Dapat Dipahami

Suatu informasi yang dihasilkan suatu pelaporan keuangan mudah untuk dimengerti oleh penggunanya dengan dituliskan serta dipaparkan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang telah diadaptasi dengan batas-batas pengetahuan penggunanya, dengan ini pengguna laporan keuangan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Stewardship theory menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi dan tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu. Dalam penelitian ini Sumber Daya Yang dimiliki digunakan untuk kepentingan tujuan organisasi yaitu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan langsung dengan sistem akan dipaksakan agar dapat menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi yang baik dan memadai setidaknya

memiliki motivasi dan rasa ingin tahu serta kemauan untuk tidak berhenti menggali dan memahami dan belajar serta menambah keahlian khususnya dibidang akuntansi, jika SDM yang menjalankan sistem akuntansi kurang memiliki keahlian dibidangnya, maka kemungkinan terbesar akan menimbulkan kekeliruan atau hambatan di dalam kegiatan serta pelaksanaan yang mencakup fungsi akuntansi.

penelitian yang pernah dilakukan oleh Pujanira and Taman (2017), Eveline (2017), Rahmawati (2015) menghasilkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Eveline (2016), hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kegagalan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menerapkan akal sehat akuntansi akan menimbulkan dampak yang *negative* seperti terjadinya kekeliruan dalam penyusunan maupun hasil dari Laporan Keuangan yang dibuat, akan terjadi ketidaksesuaian laporan dengan perundangan dan standar yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kualitasnya menjadi rendah. Dengan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM, akan semakin meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Internal

Stewardship theory menyatakan bahwa tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu, sehingga pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah lebih ke tujuan organisasi yaitu untuk memperbaiki dan menghasilkan Laporan Keuangan yang kualitasnya semakin baik bukan untuk tujuan individu. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan alur yang dibuat dan dirancang oleh manajemen agar dapat memberikan jaminan atau keyakinan yang sesuai atas tercapainya tujuan dari organisasi dengan perantara kegiatan yang berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan Pemerintah atau perundang-undangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rusvianto *et al.* (2018), Surjono (2018), Fatmawati and Setiawan (2018) hasilnya menunjukkan adanya pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati (2013), hasilnya menemukan bahwa sistem pengendalian internal di area pemerintah daerah tidak efektif untuk menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pemimpin/*Leader* dapat memberikan pengarahan terhadap bawahannya serta dapat melindungi aset yang dimiliki organisasi dari kegiatan yang negatif seperti penggelapan atau *fraud*. Apabila sistem dalam pengendalian internal suatu organisasi itu rendah, maka kemungkinan akan terjadinya suatu kesalahan, tingkat akurasi menurun atau manipulasi yang akan menguntungkan salah satu pihak dalam proses penyajian Laporan Keuangan Organisasi kemungkinannya akan sangat besar, jika di dalam suatu pemerintahan terdapat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang

tinggi, maka akan dapat menyempitkan kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan atau *fraud* dalam penyajian Laporan Keuangan, dengan ini akan menunjukkan bahwa apabila Sistem Pengendalian Internal Pemerintah semakin tinggi, maka akan diikuti dengan semakin tingginya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

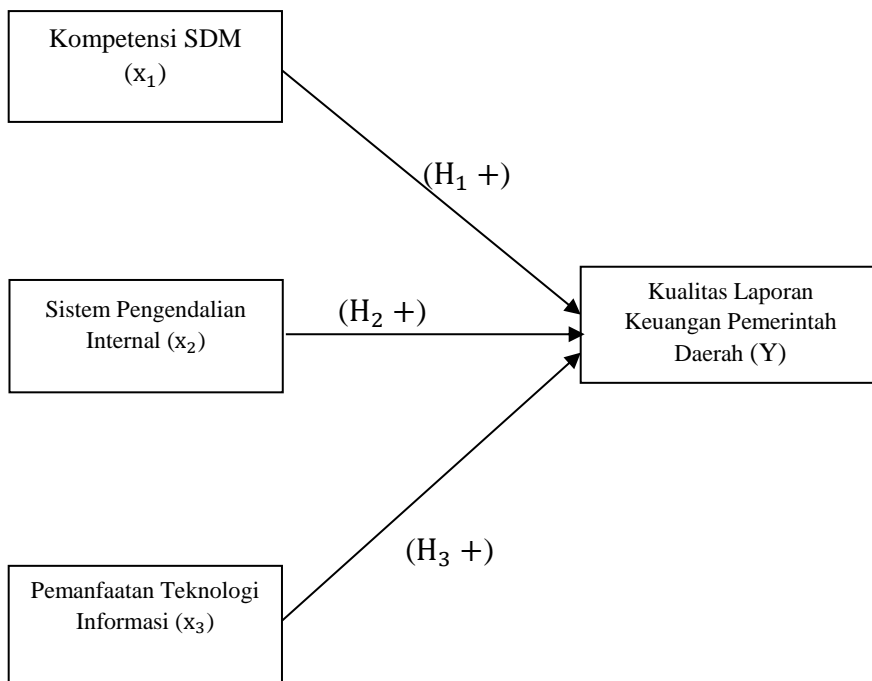
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Stewardship theory menyatakan bahwa tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu namun lebih fokus terhadap tujuan organisasi. Dalam penelitian ini Pemanfaatan Teknologi Informasi di manfaatkan dan dimaksimalkan untuk tujuan organisasi bukan untuk tujuan individu. Teknologi informasi merupakan suatu perangkat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam proses mendapatkan informasi, penyimpanan dan selanjutnya memaparkan serta menyampaikan informasi. Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu komputer dan jaringan akan sangat membantu mempermudah, mempercepat proses pengolahan data yang berupa transaksi dan penyajian laporan keuangan Pemerintah dengan ini Laporan Keuangan yang diolah tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniatin *et al.* (2017), Abdullah *et al.* (2018), dan Sari (2014) hasilnya menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu adalah salah satu

syarat yang harus dipenuhi atau indikator penting dalam Laporan Keuangan agar dapat dikatakan berkualitas, peran dari Pemanfaatan teknologi informasi Pemerintahan yaitu digunakan untuk meningkatkan ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi semakin tinggi penggunaannya, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin baik.

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Bantul. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang berjumlah 34 SKPD terdiri Badan, Dinas, Bagian maupun Kantor SKPD di Kabupaten Bantul.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli. Instrumen penelitian ini berbentuk kuesioner yang terdiri atas beberapa item pernyataan terkait dengan indikator penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu pejabat pemerintah yang terdiri dari yaitu kepala bagian, kepala bidang, keuangan, Akuntan (pencatatan dan pembukuan) dan bendahara di lingkup SKPD Kabupaten Bantul.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode survey yaitu dengan membagikan kuesioner kepada responden yang bekerja di SKPD Kabupaten Bantul (Badan, Dinas, dan Bagian di Kabupaten Bantul). Responden memilih tingkat ketidaksetujuan dan kesetujuannya atas

jawaban pernyataan yang diberikan. Item Kuesioner ini diadopsi dari Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010, Keputusan kepala BKN No 46A Tahun 2007, PP No.60 Tahun 2008 dan Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini menggunakan model skala likert 1 sampai 5 mulai dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sampai Sangat Setuju (5).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	170	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	5,88%
Kuesioner yang kembali	160	94,12%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	26	16,25%
Kuesioner yang dapat diolah	134	83,75%

Tabel 2

Data Statistik Karakteristik Responden

<i>Rekapitulasi Data</i>			
Indikator		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin :	Laki-Laki	78	50%
	Perempuan	77	50%
	Total	155	100%
Usia	Kurang Dari 24 Tahun	3	2%
	25-29 Tahun	23	15%
	30-34 Tahun	22	14%
	Lebih Dari 34 Tahun	107	69%
	Total	155	100%
Pendidikan	D3	35	23%
	D4	4	3%
	S1	91	59%
	S2	25	16%
	Total	155	100%
Lama Bekerja	Kurang Dari 1 Tahun	14	9%
	2-5 Tahun	33	21%
	6-10 Tahun	33	21%
	Lebih Dari 10 Tahun	75	48%
	Total	155	100%
Golongan	Gol II	29	19%
	Gol III	106	68%

<i>Rekapitulasi Data</i>			
Indikator		Jumlah	Persentase
	Gol IV	20	13%
	Total	155	100%
Jabatan	Pegawai	114	74%
	Kepala Bagian	6	4%
	Kepala Subbagian	25	16%
	Kepala Bidang	4	3%
	Kepala Subbidang	6	4%
	Total	155	100%

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Teoritis		Aktual	
		Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
TOTAL_KLK	134	11-55	33	35-54	44,93
TOTAL_SDM	134	6-30	18	12-30	22,06
TOTAL_SOI	134	10-50	30	30-50	40,34
TOTAL_PTI	134	6-30	18	18-30	25,46

Berdasarkan Tabel 3, variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian di SKPD Kabupaten Bantul tinggi.

Uji Validitas

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

No	Butir Pertanyaan	Nilai <i>KMO</i>	<i>Factor Loading</i>	Keterangan
1	KLK 1	0,841 > 0,5	0,503	Valid
2	KLK 2		0,789	Valid
3	KLK 3		0,702	Valid
4	KLK 4		0,717	Valid
5	KLK 5		0,620	Valid
6	KLK 6		0,545	Valid
7	KLK 7		0,629	Valid
8	KLK 8		0,532	Valid
9	KLK 9		0,734	Valid
10	KLK 10		0,550	Valid

11	KLK 11		0,613	Valid
----	--------	--	-------	-------

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Butir Pertanyaan	Nilai <i>KMO</i>	<i>Factor Loading</i>	Keterangan
1	SDM 1	0,835 > 0,5	0,630	Valid
2	SDM 2		0,891	Valid
3	SDM 3		0,846	Valid
4	SDM 4		0,867	Valid
5	SDM 5		0,783	Valid
6	SDM 6		0,805	Valid

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

No	Butir Pertanyaan	Nilai <i>KMO</i>	<i>Factor Loading</i>	Keterangan
1	SPI1	0,777 > 0,5	0,561	Valid
2	SPI2		0,638	Valid
3	SPI3		0,658	Valid
4	SPI4		0,722	Valid
5	SPI5		0,511	Valid
6	SPI6		0,723	Valid
7	SPI7		0,732	Valid
8	SPI8		0,782	Valid
9	SPI9		0,721	Valid
10	SPI10		0,688	Valid

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Butir Pertanyaan	Nilai <i>KMO</i>	<i>Factor Loading</i>	Keterangan
1	PTI1	0,891 > 0,5	0,836	Valid
2	PTI2		0,825	Valid
3	PTI3		0,785	Valid
4	PTI4		0,861	Valid
5	PTI5		0,799	Valid

6	PTI6		0,818	Valid
---	------	--	-------	-------

Uji Reliabilitas

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,874	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Internal	0,868	Reliabel
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,903	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0,874	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Model regresi dapat dikategorikan baik apabila data yang didistribusi normal setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2018).

Tabel 9
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		134
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,31362058
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,115
Kolmogorov-Smirnov Z		1,341

Asymp. Sig. (2-tailed)	,055
------------------------	------

Berdasarkan Tabel 9 tampak bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansi *Kolmogoro-Smirnov* sebesar 0,055 lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$), artinya bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan hal tersebut, model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji model regresi dalam sebuah penelitian apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas dengan syarat nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka pengujian tersebut tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinerity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,916	1,092	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,628	1,592	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	0,647	1,545	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: *Output SPSS v.25, 2019*

Berdasarkan Tabel 10 tampak variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *VIF* $1,092 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* $0,916 > 0,1$; variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *VIF* $1,592 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* $0,628 > 0,1$; dan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki

nilai *VIF* $1,545 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* $0,647 > 0,1$. Secara keseluruhan, semua variabel independen memiliki nilai *VIF* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan suatu varian dari satu residual ke pengamatan lain maka dapat dilakukan dengan uji heteroskedastisitas ini. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Correlations</i>			<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Spearman's rho</i>	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	<i>Correlation Coefficient</i>	0,087
		Sig. (2-tailed)	0,318
		N	134
	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	<i>Correlation Coefficient</i>	0,10
		Sig. (2-tailed)	0,906
		N	134
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	<i>Correlation Coefficient</i>	0,18
		Sig. (2-tailed)	0,838
		N	134

Sumber: *Output SPSS v.25, 2019*

Berdasarkan Tabel 11 tampak bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,318 > (\alpha = 0,05)$, variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi $0,906 > (\alpha = 0,05)$, dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,838 > (\alpha = 0,05)$. Dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 12
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,419	2,567		6,397	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,152	0,059	0,169	2,580	0,011
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,445	0,075	0,468	5,915	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	0,283	0,096	0,229	2,939	0,04

Berdasarkan Tabel 4.12 tampak hasil analisis regresi linier berganda, maka model persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$KLKPD = 16,419 + 0,152KSDM + 0,445SPI + 0,283PTI + e$$

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007). Nilai koefisien

determinasi dalam penelitian ini terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$) dan dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*). Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,699 ^(a)	0,489	0,477	2,340

Menurut hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.14 tampak nilai dari *Adjusted R Square* (R^2) yaitu sebesar 0,477. Hal ini menunjukkan bahwa 47,7% variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh 3 (tiga) variabel independen, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3). Sisanya yaitu sebesar 52,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian.

Uji *t*

Uji *t* merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial terhadap variabel dependen. Suatu variabel dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai sig $< 0,05$. Hasil dari pengujian ini juga melihat nilai *Unstandardized Coefficients B* (Beta), apakah arahnya negatif atau positif. Adapun hasil pengujian signifikansi secara parsial telah disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Hasil Uji *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,419	2,567		6,397	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,152	0,059	0,169	2,580	0,011
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,445	0,075	0,468	5,915	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	0,283	0,096	0,229	2,939	0,004

Hasil uji *t* yang telah disajikan pada Tabel 14 dapat menjelaskan hasil pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi dan nilai *Unstandardized Coefficients* B (Beta) dari masing-masing variabel independen. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil pengujian hipotesis:

Tabel 15
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima
H ₂	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima
H ₃	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Diterima

Uji Signifikan Secara Simultan (Uji *F*)

Tabel 16
Hasil Uji *F*

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	680,648	3	226,823	41,418	0,000 ^b
	Residual	711,928	130	5,476		
	Total	1392,396	133			

Hasil uji *F* yang terdapat pada Tabel 16 tampak bahwa nilai *F* hitung sebesar 41,418 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ ($\alpha = 0,05$). Artinya bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Y*).

KESIMPULAN, SARAN , DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 34 SKPD di Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa:

- a. Kompetensi Sumber Daya Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Sistem Pengendalian Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Saran dari peneliti untuk SKPD Kabupaten Bantul adalah SKPD Kabupaten Bantul sudah memiliki SDM yang cukup berkompeten namun harus lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui usaha peningkatan pengetahuan, pemahaman, maupun keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan sehingga *output* dari pekerjaan yang dihasilkan akan menjadi lebih maksimal, berupa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih berkualitas dengan cara seperti pelatihan, memfasilitasi pegawai yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau pengetahuan dan lainnya.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti objek penelitian dan memperluas cakupan obyek penelitian serta menambah jumlah sampel penelitian, misalnya untuk cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah atau lebih luas lagi.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel lain yang mungkin dapat memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, dan lain-lain.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi metode survey dengan menambahkan sesi wawancara atau mengajukan pertanyaan secara lisan guna

meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan serta meningkatkan keakuratan target responden yang di inginkan.

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden sehingga data yang diperoleh pada saat diolah menjadi lebih akurat karena dianggap telah mewakili sebagian besar populasi.

Keterbatasan

1. Pengumpulan data hanya dengan menggunakan kuesioner dapat menimbulkan bias di dalam pengisian kuesioner
2. Obyek penelitian yang dipilih hanya menggunakan cakupan 1 (satu) lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hanya dalam lingkup kabupaten/kota
3. Penelitian ini hanya dilakukan di 34 SKPD Kabupaten Bantul dengan jumlah kuesioner yang disebar yaitu hanya berjumlah 170 kuesioner
4. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen, sehingga kesimpulan yang diperoleh terbatas.
5. Pendistribusian kuesioner yaitu saat responden sebagian sedang bekerja sehingga tingkat pengembalian kuesioner kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, S. E. (2012). *Information technology , an enabler in corporate governance*. <https://doi.org/10.1108/14720701211234555>
- Alam, M. M., Said, J., & Abd Aziz, M. A. (2019). *Role of integrity system, internal control system and leadership practices on the accountability practices in the public sectors of Malaysia*. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 955–976. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>

- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2011). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pada skpd pemerintah kabupaten lombok timur. 3(65), 7694.
- Bantul, B. P. S. K. B. B. – S. of. (2018). Bantulkab.bps.go.id (B. P. S. K. B. B. – S. of B. Regency & Dicitak, eds.). Retrieved from <https://bantulkab.bps.go.id>
- Bintang, Mujibussalim, F. (2019). *Decentralization of Indonesia social health insurance. International Journal of Law and Management*, 61(2), 310–327. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2018-0143>
- BPK. (2018). Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018. (52), 0–3.
- Dalam, K., & Tangga, R. (2018). Siaran Pers Bersama. Jakarta: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
- Delanno, G. F. (2013). Pengaruh Kapasitas Sdm , Pemanfaatan Ti Dan. 1(1), 21–46.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eveline, F. (2017). Pengaruh Sap Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sdm, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2004>
- Fatmawati, R., & Setiawan, D. (2018). Dampak Pengendalian Intern dan Ketepatan Informasi Terhadap Kebermanfaatan Akuntansi Akrua : Studi pada Pemerintah Daerah. 5(2), 137–150.
- Fontanella, A. M. Y. (2014). Ley 975. *Diario Oficial* 45980, 1–65. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Ghozali. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*.
- Hanafi, R. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 8(16).
- Harlinda, H. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada

- Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *Sorot*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.31258/sorot.11.2.3890>
- Imran. (2015). *the Role of Information Technology As Moderating Variable and Internal Control Effectiveness As Intervening Variable in the Relationship Between Human Resource Competency and Inter ...* (October).
- Jafari Navimipour, N., & Fouladi, P. (2017). *Human Resources Ranking In A Cloud-Based Knowledge Sharing Framework Using The Quality Control Criteria*. *Kybernetes*, 46(5), 876–892. <https://doi.org/10.1108/K-01-2017-0007>
- Jones, C. D. (2010). *An Examination of the Government Accounting Standards Board*.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Krambia, M. et al. (2016). Satisfaction gap in public sector financial reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(3), 232–253. <https://doi.org/10.1108/jaee-08-2013-0040>
- McClelland. (2012). *Design principles to accommodate older adults*. *Global Journal of Health Science*, 4(2), 2–25. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v4n2p2>
- Mildamayanti, Muntu abdullah, dan M. A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 3.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 176–185.
- Murwaningsari. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 30–41. <https://doi.org/10.9744/jak.11.1.pp.30-41>
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, Dan Kualitas Anggaran Skpd (Suatu Pengujian Struktural). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3621>
- Peraturan pemerintah nomor 60 tahun. (2008). Peraturan pemerintah nomor 60

tahun 2008. 61–64.

- Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010. (2010). Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Dengan.
- Petrakaki, D., Hayes, N., & Introna, L. (2009). *Narrowing down accountability through performance monitoring technology: E-government in Greece*. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 6(3), 160–179. <https://doi.org/10.1108/11766090910973911>
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Puri dan Dwi. (2015). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7, 53.
- Rahmawati. (2015). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). 1–19.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal BanqueSyar'i*, Vol. 4 No., 33–67.
- Sari. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi. 3(1).
- Sari, S. P. (2014). Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia , Pengendalian Internal. (Sancall), 418–425.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach* (Seventh Ed). Retrieved from www.wileypluslearningspace.com
- Sholohah. (2018). Fokus Ekonomi. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 13(2), 280–300.
- Surjono, O. R. A. (2018). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Perpajakan*, 2(2), 96–111.
- Suyanto, M. (2005). Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Penerbit Andi.
- Unger, D., & Mahakanjana, C. (2016). Decentralization in Thailand. *Southeast*

Asian Economies, 33(2), 172–187. <https://doi.org/10.1355/ae33-2d>

Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Bisma*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7602>

Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>

Yosefriandi. (2013). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. 4, 9–15.

Yuniatin, N. Y., Azam Achsani, N., & Sasongko, H. (2017). Pengaruh Perubahan Status, Employee Engagement, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(4), 495. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i4.2001>

